

Tinjauan yuridis tentang pemagangan di Indonesia: studi kasus putusan no. 01/G/2012/PHI.PN.MTR dan 352 K/Pdt. Sus-PHI/2015 = Juridical review about apprenticeship in Indonesia: case study no 01/G/2012/PHI.PN.MTR dan 352 K/Pdt. Sus-PHI/2015

Firman Adi Prasetyo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458629&lokasi=lokal>

Abstrak

**ABSTRAK
**

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan program pemagangan di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Magang dalam hukum positif di Indonesia merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kompetensi tertentu kepada para pesertanya melalui pemberian sertifikat. Pada kenyataannya, peserta magang seringkali tidak mendapatkan hak dan kewajiban selayaknya peserta magang sehingga terjadi beberapa kasus pelanggaran dalam program pemagangan yang naik ke permukaan. Peraturan mengenai magang sendiri dirasa tidak terlalu kuat sehingga terjadi banyak pelanggaran dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai magang masih kurang lengkap dan didapatkan beberapa faktor untuk menentukan apakah suatu hubungan dapat diklasifikasikan sebagai skema pemagangan atau skema pemekerjaan.

<hr>

**ABSTRACT
**

This thesis analyzes about the problems that occur in the apprenticeship program in Indonesia, both in terms of regulation and implementation. An apprentice, refer to Indonesian Labour Regulation, is part of cooperative job training basically aims of gaining experience and certain competence for the participants through the provision of certificates. In fact, apprentices do not get their rights and duty like the ordinary apprentices frequently, thus there are some cases about the breach in apprenticeship program which rise to the surface. The regulation on apprenticeship is not too strong that cause many breaches in the implementation. The research method is normative juridical by means of literature study conducted of secondary data and equipped with interviewing informants. This research is descriptive analytical using a qualitative approach. The results obtained by writers through research is knowing that regulations governing about apprenticeship in Indonesia is still weak and the writers obtained several factors to determine whether a relationship can be classified as apprenticeship scheme or work scheme.